

## GERAKAN HIZBUT TAHRIR DI KOTA PARE-PARE (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani)

**Sitti Jamilah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pare-Pare

Email; jamilahpare@gmail.com

**Abstrak :** Gerakan fundamentalis dalam Islam umumnya -khususnya Hizbut Tahrir- berasal dari sejumlah negara di Timur Tengah yang diadaptasi mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di negara-negara tersebut, meskipun sebagian juga mengambil ide-ide modernis dalam kesesuaiannya dengan Islam. Dalam konteks Indonesia, keberadaan HT sebenarnya sudah mulai ditemukan jauh sebelum jatuhnya Orde Baru. HT Indonesia sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman al-Bagdadi dan Musthofa. Hizbut Tahrir Indonesia tidak secara gamblang menyebut Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial, sebab sejak berdirinya Hizbut Tahrir ini, memang sudah memproklamkan diri sebagai aktivitas politik, praktis segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan pemikiran politik, baik itu berbicara masalah ekonomi maupun berbicara tentang aktivitas sosial Hizbut Tahrir Indonesia. Hubungan gerakan HTI dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam gerakan sosial di kota Parepare, dapat dikatakan bahwa pemikiran Taqiyuddin sudah tidak terlalu dominan lagi yang digunakan di HTI Parepare, HTI mengembangkan metode *tabanni* atau yang lazim mereka sebut pengadopsian pemikiran.

**Keywords :** Hizbut tahrir - Gerakan Sosial - Politik - Pare-Pare

### I. Pendahuluan

Pemikiran dan gerakan fundamentalis berasal dari sejumlah negara di Timur Tengah yang diadaptasi mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di negara-negara tersebut, meskipun sebagian juga mengambil ide-ide modernis dalam kesesuaiannya dengan Islam. Salah satu negara Timur Tengah yang melahirkan tokoh pemikir fundamentalis adalah Yordania dengan sosok Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977) yang mendirikan Hizbut Tahrir (selanjutnya cukup disebut dengan HT) sebagai organisasi gerakan politik.

Kesadaran politik Taqiyuddin al-Nabhani sebenarnya sudah terbangun berbarengan dengan kesadaran intelektualnya. Pada saat belajar di Al-Azhar, Taqiyuddin menyerukan kepada ulama Al-Azhar untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Kesadaran politiknya

semakin kokoh setelah bertemu dengan Syaikh Izzuddin al-Qassam, seorang ulama yang menjadi tokoh perlawanan terhadap Inggris dan Yahudi. Menurutnya, untuk merebut kembali Palestina, diperlukan kesadaran dan perjuangan di kalangan umat. Kejayaan umat dapat diraih kembali dan terwujud jika umat memiliki kesadaran politik yang berbasis pada akidah dan iman kepada Allah.<sup>1</sup>

Hizbut Tahrir sebagai partai politik secara resmi didirikan di al-Quds pada tahun 1952, dan Taqiyuddin mengirim surat pada penguasa setempat tentang pendirian partainya. Namun para penguasa menolak dengan tegas kehadiran HT, tetapi masyarakat setempat membarikan dukungan atas kehadiran HT. HT dengan strategi organisasinya yang berlapis, berhasil mengatasi berbagai tekanan dalam bentuk pembubaran dan pelarangan para anggotanya untuk berbicara, bahkan terus melebarkan sayap. HT berkembang semakin pesat di bawah kepemimpinan Abdul Qadim Zallum dengan menyerukan kepada para anggotanya untuk menyebar ke seluruh dunia. Zallum juga memindahkan markas HT ke London dan hidup secara rahasia di sana. Para anggota HT melakukan diaspora setelah banyak di negara Timur Tengah, HT dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Mesir, HT dilarang secara resmi pada 1974. Di Irak pengikut HT mengalami tekanan Inar biasa dari rezim Saddam Husein. Di Pakistan, anggota HT menghadapi tekanan dari Jenderal Musharraf. Demikian pula halnya di Turki, Aljazair dan Maroko. Sebaliknya, di beberapa negara termasuk di Indonesia, HT diakui sebagai organisasi yang legal.<sup>2</sup>

Hizbut Tahrir (dalam konteks Indonesia disebut Hizbut Tahrir Indonesia) adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, sehingga politik merupakan kegiatan pokoknya dan Islam adalah ideologinya. "*Selamatkan Indonesia dengan Syariah Islam*", "*Persatuan Umat Islam dalam Sistem Khilafah*" dan "*Tolak Intervensi Amerika*" adalah sederetan slogan yang sering diteriakkan oleh HT, yang berbau dan bernada fundamentalis. Terma HT berarti 'partai kemerdekaan', tetapi sejak kedatangannya di Indonesia tidak pernah ikut dalam Pemilu. Padahal, massa dan simpatisannya cukup besar, yang tentu saja bagi kelompok lain di tanah air hal tersebut akan dimanfaatkan untuk meraih kursi di parlemen.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan HT sebenarnya sudah mulai ditemukan jauh sebelum jatuhnya Orde Baru. HT Indonesia sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman al-Bagdadi dan Musthofa. Al-Bagdadi adalah pendatang dari Lebanon yang memang sejak awal berasal dari keluarga aktifis HT. Al-Bagdadi kali pertama datang dan menetap di Indonesia melalui Abdullah bin Nun –yang juga pengasuh Pesantren al-Ghazali pada tahun 1981 untuk membantu Pesantren al-Ghazali yang diasuhnya. Sementara Musthofa mulai intens berkenalan dengan HT

---

<sup>1</sup> Jamhari dan Jajang jahroni, *Gerakan Salafi radikal di Indonesia*, (Cet. I Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 167

<sup>2</sup> Jamhari dan Jajang jahroni, *Gerakan Salafi radikal di Indonesia*, h. 168-169.

ketika dikirim oleh orang tuanya berpandangan modernis dan memiliki kedekatan dengan DDI serta belajar di Jordania.<sup>3</sup>

Dalam penyebarannya, gerakan ormas HT telah menyebar ke seluruh nusantara, termasuk di kota Parepare yang merupakan salah satu kota kecil yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat di kota ini sangat heterogen dalam berbagai perspektif, baik dari sisi agama, budaya masyarakat dan lain-lain. Kota Parepare adalah kota yang terbuka lebar menerima segala perubahan, karena kota ini merupakan salah satu kota dermaga sehingga disebut pula dengan Kota Bandar Madani.

Dalam ranah agama, kota ini merupakan kota santri dengan hadirnya dua Pondok Pesantren yang salah satunya Pondok Pesantren yang didirikan oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle yakni Pondok Pesantren DDI Lil Banat. Banyak ulama-ulama yang lahir dari kota ini dalam didikan dan bimbingan langsung Gurutta Ambo Dalle. Selain Pondok Pesantren, kota ini memiliki beberapa perguruan tinggi berbasis agama, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-pare.

## II. Pemetaan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Membangun HT

### 1. Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani lahir pada tahun 1909, nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad Itln Nashiruddin an-Nabhani dari keluarga kalangan terhormat, yang hidup di desa Ijzim, Selatan kota Haifa, wilayah jajahan Kiral Mahral (tahun 1949).<sup>4</sup>

Keluarga an-Nabhani adalah keluarga mulia, yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan agaraa. Nasab keluurgft beliau kembali pada keluarga besar (*trah*) an-Nabhani dari kabilah «h Hanajirah di *Bi'r as-Sab'a*. Banu (keturunan) Nabhan merupakan kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm<sup>5</sup> yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina.

Lingkungan tumbuh Taqiyuddin memberikan pengaruh besar kepada pembentukan kepribadian Islam Taqiyuddin. Taqiyuddin sangat dipengaruhi oleh ketakwaan dan kesadaran sang kakek dan mengambil banyak pelajaran yang bermanfaat dari sang kakek. Di usia yang sangat muda Taqiyuddin telah

<sup>3</sup> A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 147-148

<sup>4</sup> Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir" ([Harmokol924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddinnabhani.html](http://Harmokol924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddinnabhani.html)). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.

<sup>5</sup> Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir ke-2 Masehi sekelompok dari bani Lakhm tiba di Palestina bagian Selatan. Bani Lakhm memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan diantara yang terkenal adalah Tamin ad-Daroy ash-Shahaby. Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-khilafah al-Islamiyyah*, Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah* (Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008), h. 59-60.

mendapatkan kesadaran politik, terutama masalah-masalah politik yang penting. Kakek Taqiyuddin sering mengajak Taqiyuddin menghadiri diskusi-diskusi dan majelis-majelis yang dipimpin langsung oleh kakeknya di zaman daulah Utsmaniyah utamanya yang terkait dengan masalah-masalah Fiqhi, kecerdasan yang diperlihatkan Taqiyuddin membuat Syekh Yusuf meminta kepada bapak Taqiyuddin untuk mengirim Taqiyuddin belajar di al-Azhar guna melanjutkan pendidikan *Syar'i*.

## 2. Pemikiran dalam Bidang Politik

Umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.<sup>6</sup> Menurut HT, perbedaan utama antara akidah Islam dan akidah-akidah lainnya terletak pada dimensi politik dan ruhani. Hal yang keliru jika umat Islam terutama ulania harus menjauhi politik. Anggapan ini menurutnya merupakan pengaruh dari paham sekuler Barat, yang masih trauma dengan campur tangnn gereja terhadap kekaisaran Eropa abad pertengahan. Oleh karena itu, aspek spiritual dan politik merupakan bagian yang integral dari Islam. Bagi Hizbut Tahrir, Islam adalah ideologi (*mabda'*) dunia dari dim ideologi lainnya, yakni kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Kesadaran politik sangat ditekankan pada gerakan ini. Dalam kitab *Fikr al-Islam* (kitab panduan bagi anggota pemula Hizbut Tahrir, at an sering disebut *halaqah 'amm*), terdapat penegasan tentang pentingnya kesadaran politik bagi umat Islam, yaitu kemaslahatan akan terwujudnya Islam menjadi acuan politik, bukan ideologi yang lainnya.

## 3. Pemikiran dalam Bidang Ekonomi

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, selalu bergantung pula pada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen lain sebagainya.<sup>7</sup> Semua ini membentuk sebuah sistem yang rumll biasa disebut kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu (ujiinn utttffli yaitu kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dapat dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula. Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia bukan terletak pada keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan. Akan tetapi, pada buruknya pendistribusian kekayaan yang berdampak kepada kemiskinan individu dan tidak adanya kesempatan kepada setiap individu rakyat untuk memperoleh kekayaan serta memanfaatkannya.

## 4. Pemikiran dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi (*mabda'*) terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun

---

<sup>6</sup> Hizbut Tahrir, *Afkar al-Siyasiyah* (Beirut; Dar al-Ummah, 1994), h. 10

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 4

beberapa pemikiran-pemikiran lain, yang sifatnya cabang juga. Dikatakan ideologi kejujuran, ideologi kesetiaan, dan ideologi tolong menolong, atau dikatakan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar perundang-undangan dan dasar-dasar sosial. Semua itu, mereka maksudkan pemikiran-pemikiran tertentu tentang ekonomi yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya; pemikiran-pemikiran tertentu tentang perundang-undangan yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya; dan seterusnya. HT berpendapat ini semua tidak benar. Sebab, semuanya ini bukan ideologi, melainkan kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran.

### III. Hubungan Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Parepare dengan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Gerakan Sosial

#### a. Bidang Politik

Dalam konteks ke-Indonesian (Kota Parepare khususnya), pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terutama tentang ajaran politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, konsep negara, khilafah dan jihad dikaji dan digunakan sebagai landasan pijak bagi gerakan HTI di Kota Parepare. Terutama ketika mereka melakukan *halaqoh*, maka buku karangan Taqiyuddin an-Nabhani yang dijadikan sebagai buku kajian dan materi utama dalam kajian *halaqoh* tersebut. Apa yang biasanya disebut sebagai kebangkitan Islam di Indonesia adalah hadimnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980-an, ditandai oleh rnenguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama mereka dengan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Seluruh aktivitas yang dilakukan HT bersifat politik, dimana HT memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang *syar'i* sebab politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan Islam. Sejak awal HT juga mengklaim organisasi mereka sebagai partai politik.

#### b. Bidang Ekonomi

Perlu penulis paparkan bahwa seluruh aktivitas HT itu berorientasi pada politik, baik itu bidang sosial kemasyarakatan maupun di bidang ekonomi semuanya bermuara pada politik. Dalam buku karangan Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul: *An-Nizam al-Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam), mengulas secara panjang lebar kritikan terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis sosialis. Buku tersebut juga menjelaskan kekacauan dan kekeliruannya secara menyeluruh (mendasar), dan memaparkan bagaimana sistem dan pemikiran Ekonomi Islam disertai dengan hukum-hukumnya.

### IV. Pandangan Kristis Terhadap HTI di Kota Parepare

Satu hal yang menjadi perhatian umat adalah hasil pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai *founding fathersnya*, yang menyatakan bahwa: 'Barang siapa yang tidak membai'at khalifah hingga akhir hayatnya, maka

orang tersebut telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah penyembah berhala. Artinya setiap orang yang meninggal pada masa antara era kekhalifahan hingga sekarang yang sudah berlangsung ratusan tahun tersebut, semuanya telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah, karena pada masa tersebut umat Islam tidak lagi mengenal pemerintahan khilafah. Kemudian dewasa ini, dengan berlalunya era ke-khilafah-an, lalu apakah setiap orang berdosa karena mereka tidak lagi memiliki khalifah pada sebuah negara yang berbentuk khilafah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin, bukan dalam hal kewajiban mendirikan negara Islam. Karena hanya orang bodoh (jahiliyah) yang tidak akan menyusun tatanan sosial tanpa pemimpin, tanpa pemerintahan.

Syari'ah Islam menurut HTI adalah solusi terhadap semua krisis yang dialami oleh bangsa ini. Syari'at Islam diperlukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak karena Allah semakin dijauhkan dari kehidupan mereka. Di bidang hukum, efek jera hukum Islam dianggap lebih kuat dibanding sistem yang selama ini berlaku. Efek jera ini sangat diperlukan jika bangsa Indonesia sangat ingin mengatasi problem akut yang sudah sekian lama tidak bisa dipecahkan, yaitu kolusi, korupsi dan nepotisme. Di bidang ekonomi, ekonomi Islam dianggap jauh lebih menjanjikan dalam menciptakan kesejahteraan umat dibandingkan ekonomi sekuler yang tidak bisa lepas dari riba. Keadilan sosial akan bisa tercapai jika menerapkan syari'at Islam, karena sistem ini lebih memihak kepada masyarakat luas dibandingkan sekedar membela kepentingan kelompok minoritas elit seperti dalam sistem kapitalis. Jika sistem kapitalis melahirkan kesenjangan sosial, sistem ekonomi Islam akan melahirkan keadilan sosial.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa konsep Islam *Kaffah* memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau ke-khilafahan Islam. Sementara mayoritas umat Islam berpandangan bahwa kewajiban umat adalah taat pada pemerintah yang sah dan berdaulat, sedangkan bentuk dan sistem pemerintahannya cukup sesuai dengan bentuk dan sistem di-negara masing-masing. Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara memposisikan dan melihat syari'at Islam, serta bagaimana syari'at Islam beroperasi ditengah masyarakat, terutama masyarakat plural di Indonesia.

Demokrasi adalah sistem yang dipilih bangsa Indonesia sejak berdirinya republik Indonesia, mulai dari demokrasi terpimpin yang dipraktekkan Soekarno sampai demokrasi Pancasila yang di usung Orde Baru. Meskipun kedua model demokrasi tersebut pernah dimanipulasi oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu, di era reformasi ini demokrasi masih tetap dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Cita-cita memperjuangkan syari'at Islam tidak mungkin dapat diperjuangkan apabila melalui jalan demokrasi, karena demokrasi yang dipersiapkan memang bukan untuk Islam, kalau pendapat saya kenapa banyak umat Islam yang menempuh jalan itu bisa jadi yang pertama, cita-cita yang mereka ingin perjuangkan itu tidak sampai pada tatanan ideal yang seperti yang diperjuangkan oleh HT, artinya cita-citanya memang bukan bagaimanana

Islam ini bisa tegak, dan menjadi aturan positif, bila ditanya apakah ada perubahan yang diperoleh lewat parlemen pasti jawabannya pasti ada, tetapi itu tidak sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh HT yakni perubahan yang sifatnya rekonsional, fundamental yang menyeluruh bukan perubahan yang sifatnya parsial.

Demokrasi dianggap telah gagal menjawab problem kontemporer bangsa dan gagal melahirkan perubahan. Ketika sistem demokrasi telah gagal, maka sistem syari'at Islam adalah alternatifnya. Demokrasi harus diganti dengan sistem yang berbasiskan pada syari'at Islam yang punya kepastian hukum yang tetap karena diciptakan oleh Allah. HT mendeklarasikan organisasinya sebagai partai politik dan anti demokrasi, atau dalam bahasa agamanya mengharamkan demokrasi dan memperjuangkan khilafah Islamiyah. Melalui dua strategi, yaitu diseminasi ideologi dan kaderisasi, kaum fundamentalis (termasuk HTI) masuk ke lembaga-lembaga pendidikan di semua tingkatan. Strategi pertama, penyelenggaraan program peribadatan seperti training keislaman di lembaga pendidikan, yaitu training Islam pemula (*Islamic Training for Beginners*), bimbingan belajar bagi mahasiswa, pelayanan buku-buku harakali atau gerakan. Strategi kedua, kaderisasi. Gerakan ini melakukan latihan yang bakal dibina untuk menjadi kader gerakan.

Ketika penulis membelokkan wawancara kepada responden dan meminta pendapatnya apakah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani masih berpengaruh terhadap HTI yang ada di Parepare baik itu di bidang politik ekonomi dan sosial kemasyarakatan secara umum Tamzil Hadi menjelaskan bagaimana pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tersebut.

Secara pribadi jelas sangat mempengaruhi, banyak kitab-kitab beliau yang kami kaji secara langsung. HTI adalah sebuah partai politik, tanpa memungkiri bahwa Taqiyuddin an-Nabhani adalah pendiri dari Hizbut Tahrir, beliaulah yang banyak berijtihad termasuk konsep yang diperjuangkan dalam Hizbut Tahrir. Namun perlu saya sampaikan, bahwa di HTI ada yang dikenal dengan konsep *Tabanni*. *Tabanni* adalah konsep pengadopsian yang awalnya bersumber dari individu, dari mujtahid, atau kalangan ulama dan fuqaha dan seterusnya, setelah dianalisis dan dikaji kemudian diadopsi menjadi bagian dari pemikiran Hizbut Tahrir, artinya akan ada transformasi yang awalnya pemikiran individual setelah diadopsi oleh HTI tidak lagi menjadi identik bahwa pemikiran HTI itu adalah pemikiran Taqiyuddin an Nabhani tetapi itu sudah dianggap sebagai pemikiran yang sudah diadopsi oleh sebuah Partai Dakwah yang bernama HTI yang kemudian menjadi visi misi yang diperjuangkan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa gagasan-gagasan dasar dari HTI itu banyak dipengaruhi oleh pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah penulis kemukakan lebih awal; bahwa sesungguhnya HT itu adalah sebuah partai politik, walaupun dalam kenyataannya gerakan yang dilakukan adalah sebuah gerakan sosial, akan tetapi mulai dari pendiri

<sup>8</sup>Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014

HT yakni Taqiyuddin an-Nabhani sampai generasi HT sekarang ini tetap mengakui bahwa sesungguhnya HT itu adalah sebuah partai politik, sebuah gerakan dakwah yang memperjuangkan tegaknya syari'at Islam. Penulis kemudian mempertanyakan mengapa HT tidak sekalian mendaftarkan partainya sebagai peserta pemilu supaya ide-ide penjuangan yang diperjuangkan dapat diperjuangkan lewat parlemen, namun dijawab oleh informan penulis sebagai berikut:

Sebuah partai politik pasti punya cita-cita politik yang diperjuangkan secara konsep untuk menjalankan sistem politik yang diperjuangkan dalam pranata politik yang diperjuangkan ada sistem politiknya, ada sistem ekonominya, ada sistem sosialnya, termasuk untuk menciptakan masyarakat sejahtera, ini yang harus dimiliki dan HT sudah memiliki perangkat-perangkat politik itu, dan inilah yang diperjuangkan dan didakwahkan. Dan bisa jadi ada pendapat imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama yang lain yang kemudian diadopsi yang sejalan dan relevan dan dibawa masuk dalam konsep fikroh HT dan ketika itu telah masuk, inilah sebabnya mengapa tidak bisa lagi dikatakan identik, tetapi pemikiran Taqiyuddin masih berpengaruh terhadap HT, karena dialah yang pertama merumuskan kerangka berpikir awal gerakan ini.<sup>9</sup>

Kenyataannya, HTI tetap memperkenalkan diri sebagai partai politik, ketika penulis mencari data pada Kesbang, penulis memang tidak menemukan HTI sebagai anggota ormas yang terdaftar, menjadi menarik kemudian bagi penulis, karena HTI telah masuk ke Parepare sekitar tahun 2000-2001, ini penulis temukan datanya dari wawancara tertulis yang dikemukakan responden yang mayoritas menyatakan bahwa HTI masuk di Parepare sekitar tahun 2000 atau 2001 tetapi tanggal tepat masuknya tidak diketahui oleh para Hizbiyyin.

Begitu juga tentang jumlah keanggotaan penulis menangkap bahwa para aktivis HTI ini cenderung sangat berhati-hati sekali dalam memberikan informasi tentang jumlah anggota dan bagaimana sistem keanggotaan yang berlaku di HTI di Parepare. Lalu kemudian penulis mempertanyakan kepada informan, apakah mereka merasa terhambat di Kota Parepare ketika mereka ingin menuangkan ide-ide pemikiran mereka, dimana di Kota Parepare sudah terlebih dahulu hidup dan berkembang organisasi seperti Muhammadiyah, NU dan *Darud Dakwah wal Irsyad* (DDI), namun HT beranggapan bahwa keberadaan ormas tersebut tidak dirisaukan oleh HTI karena secara organisasi mereka berbeda. HTI sebagai Partai politik di satu sisi, dan NU serta Muhammadiyah sebagai ormas di sisi lain: Tentang Islam kultural NU dan Muhammadiyah: *Hizb* tidak berada dalam konteks bersaing, tidak ada keinginan untuk bagaimana kemudian berlomba-lomba sampai pada tingkat yang terbesar, tetapi semata-mata hanya sampai pada tingkat dakwah dan apa yang didakwakan itu untuk kebaikan Islam, persoalan *Hizb* sudah ada di Parepare dan pada saat yang sama sudah ada Muhammadiyah dan sudah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014



ada NU sebenarnya munculnya misalnya gesekan kalau ada, saya pribadi memahami lebih pada waktu yang dibutuhkan diantaranya untuk saling memahami antara satu dengan yang lain, saya kira kita berangkat saja pada satu karakter yang dimanapun pasti ada yang lebih lama, ada yang lebih dulu pasti ada resistensi dalam menyikapi hal yang baru dan memang ada kendala terkait dengan bagaimana kalangan-kalangan ini bisa memposisikan HT sebagai bagian dari satu umat itu yang kemudian juga punya tujuan untuk memperbaiki umat, punya tujuan untuk mendakwahkan Islam, punya tujuan untuk menjadikan kondisi yang ada sekarang ini, menjadi kondisi yang lebih baik, apalagi sebenarnya kalau berangkat dari identitas HTI sebenarnya tidak berada pada konteks yang dibentur-benturkan antara NU dan Muhammadiyah karena HT itu Partai, bukan gerakan mazhab bukan gerakan aliran.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini, penulis simpulkan bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tidak identik dengan HTI, tetapi pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir masih dijadikan landasan terutama beberapa buku-buku Taqiyuddin yang digunakan oleh HTI pada saat HTI melakukan kajian-kajian atau halaqoh-halaqoh dikalangan HTI. Buku-buku yang penulis maksud diantaranya *ad-Daulah al-Islamiyah*, *Nizham al-Islamiyah* (Peraturan hidup dalam Islam), *al-Syakhsiyah al-Islamiyah* (Keperibadian Islam) dan *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam* (sistem Ekonomi Islam). HTI juga mengembangkan metode *Tabanni* yakni suatu metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir berupa pengadopsian ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang diambil dari kalangan ulama, mujtahid dan pemikir-pemikir Islam lainnya yang sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, sebagaimana petikan wawancara langsung penulis dengan responden sebagai berikut:

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sudah tidak identik dengan pemikiran Hizbut Tahrir yang ada sekarang walaupun tetap mempengaruhi, karena hampir semua kitab-kitab Taqiyuddin dikaji misalnya bila orang pertama kali dibina dalam kajian itu adalah kitab *nizham fi Islam* (peraturan hidup dalam Islam), mulai dari persoalan akidah, syariat dan hukum-hukum ibadah memang ditulis oleh beliau dan masih tetap dikaji. Hanya yang tidak identik dengan beliau adalah ada hal-hal tertentu, ada ruang-ruang tertentu itu diadopsi Hizb juga dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain.<sup>11</sup>

Dalam Hizbut Tahrir kita akan menemukan anggotanya ada yang NU, Muhammadiyah dan persib, tetapi ketika berada dalam konteks Hizbut Tahrir, yang punya cita-cita politik maka dalam konteks perjuangan politiknya itu, itulah yang di *tabanni*, yang kemudian yang menjadi pengikat. Seiring dengan perjalanan waktu, bisa saja ada pendapat Taqiyuddin an-Nabhani ada yang dianggap tidak relevan, kitab-kitabnya ada yang dianggap perlu di *up date*, faktualnya mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014

Hasil temuan penulis bahwa HTI sangat tidak *fair* dalam berbangsa dan bernegara. Di satu sisi HTI sangat menolak demokrasi pada umumnya dan demokrasi Pancasila pada khususnya tetapi menggunakan fasilitas dan perangkat yang ada di Indonesia. Contohnya, tidak sedikit dari anggota/aktivis HTI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta dan masih ada yang menjadi tenaga, bahkan seorang guru dan mereka hidup dan beraktivitas di wilayah negara Indonesia, menggunakan fasilitas yang notabene adalah dikelola oleh pemerintah yang menurut penilaian mereka meniru-niru sistem kapitalis.

Penilaian penulis, khusus wilayah Indonesia para aktivis HTI seolah-olah berusaha menutup nurani mereka bahwa Pancasila yang mereka tolak adalah memiliki nilai-nilai ke-Islaman mulai dari sila pertama sampai sila kedua, tidak satupun dari sila tersebut yang menurut hemat penulis bertentangan dengan Pancasila jika mereka ingin mengkaji lebih dalam makna dan nilai filosofis yang terkandung di setiap sila yang di dalam Pancasila. Hemat penulis, sebuah konsep tidak mesti harus menggunakan label Islam baru kemudian dikatakan bahwa gagasan dan ide itu Islam, yang lebih penting ketika gagasan dan ide tersebut tidak menggunakan label Islam tetapi praktek dan aplikasi yang dilakukan sehari-hari bernuansa Islam.

Esensi syari'ah dimaksud adalah tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni pengakuan ketuhanan secara monoteistik (sila Pertama); penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan (sila Kedua); penolakan secara eksplisit terhadap separatisme dan mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila Ketiga); kepemimpinan yang bijaksana (hikmah) dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila Keempat); jaminan kesejahteraan rakyat, keadilan dan perlindungan hukum untuk siapapun tanpa kecuali (sila Kelima). Tidak satupun dari pesan-pesan luhur itu yang bertentangan dengan ajaran manapun yang dianut oleh bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila merefleksikan esensi syari'ah sebagaimana diyakini para pendiri bangsa.

Demokrasi Pancasila adalah salah satu bentuk model negara yang ada, dan al-Qur'an tidak memiliki satu ayat pun yang menyatakan bahwa khilafah adalah yang terbaik, Islam menganjurkan untuk hidup rukun, taat kepada ulil amri, bermusyawarah, dan memanusiaikan manusia, tidak menganjurkan umatnya untuk menganggap diri paling benar dan dengan mudah menuduh atau mengklaim seseorang atau kelompok sebagai kafir. Islam menganjurkan umatnya untuk berkata hikmah, tidak mencaci dan menganggap diri paling benar. Mengapa Rasulullah tidak menetapkan sebuah model negara, karena hemat penulis Rasulullah ingin menyerahkai kepada umatnya untuk menggunakan pemikirannya, menggunakan rasionya untuk menetapkan apa yang baik dan terbaik untuk dijalani tidak cerkecuali pada model negara mana umatnya menjatuhkan pilihan untuk digunakan bernegara. Karena Rasulullah saw. menyatakan bahwa umatnya lebih tahu urusan yang mereka hadapi.

Seyogyanya sebagai warga negara, sudah tidak lagi mempertentangkan Pancasila, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang

bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, bukan menggunakan agama sebagai kendaraan untuk memperlemah persatuan dan kesatuan dalam wilayah NKRI. Dalam kondisi sekarang ini, penulis menilai konsep khilafah yang diperjuangkan oleh HTI, tidak terlalu relevan untuk diterapkan mengingat, masyarakat Indonesia bukan masyarakat homogen akan tetapi masyarakat heterogen yang didalamnya termuat beragam agama dan aliran kepercayaan. Penulis membandingkan ketika Rasulullah menandatangani Piagam Madinah, masyarakat ketika itu sangat heterogen, tentunya ada yang beragama Yahudi, Nasrani dan Islam tetapi mereka hidup berdampingan dan damai tanpa ada pemaksaan untuk masuk Islam, lalu atas dasar apa HTI harus melampaui nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh Rasulullah ketika itu, dengan membawa konsep dan gagasan yang terkesan memaksakan untuk mendirikan negara Islam.

Penulis berpendapat bahwa untuk negara yang mayoritas atau murni beragama Islam sekalipun, penduduknya akan menolak ide atau cita-cita negara khilafah tersebut. Berikut bukti sejarah bagaimana perjuangan Taqiyuddin an-Nabhani memperjuangkan partai politik ini agar bisa diterima di negara asal terbentuknya HT, fakta sejarah menyatakan bahwa pemerintah Yordania menolak HT ini hidup dan berkembang di negaranya bahkan dinyatakan sebagai partai yang terlarang, kita bercermin pada perjuangan Hasan al-Banna di Mesir nasib kaum Ikhwanul Muslimin tidak lebih baik dari nasib yang dialami oleh HT atau organisasi-organisasi Islam garis keras yang berusaha memperjuangkan negara Islam.

Saat ini masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya disentakkan oleh sebuah organisasi yang ide, arah dan gagasan perjuangannya sama dengan ide, arah dan gagasan yang diperjuangkan oleh HTI, organisasi tersebut bernama *Islamic State of Irak and Syiria* (ISIS). Tahun 2003 menjadi cikal bakal terbentuknya ISIS yang berawal dari gerakan Tauhid dan jihad, sebuah kelompok teroris bentukan pemerintah Irak setelah jatuhnya Saddam Husein, kelompok ini juga gencar menentang invasi pimpinan Amerika Serikat.

Dulu HTI masuk di Parepare tidak diperhatikan oleh pemerintah membawa paham tentang khilafah, sesungguhnya paham mereka yang harus diperbaiki, karena paham yang mereka bawa keliru, yang seakan-akan mau memaksakan, sekarang ini belum nampak pemaksaan yang HTI lakukan, tetapi suatu saat jika telah kuat mengakar maka akan muncul perlawanan yang tidak menutup kemungkinan cara Bergeraknya akan seperti ISIS.

Gerakan ISIS bagaimanapun telah mendapat respon dari pemerintah tempat ISIS ini tumbuh dan berkembang, juga mendapat respon dari pemerintah Indonesia salah satunya dari Koranpenmas Divhumas Polri Brigjen Boy Rafi Anwar yang menyatakan bahwa Undang-undang Ormas mengatur secara tegas bahwa ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal senada diungkapkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan bahwa ISIS merupakan persoalan di Timur Tengah yang dalam hal

ini tumbuh di Irak dan Syiria, jangan sampai masuk ke sini dan tidak boleh ada ISIS di Indonesia karena Indonesia adalah NKRI.<sup>12</sup>

Pengamatan penulis menilai bahwa sesungguhnya pemerintah selain waspada terhadap gerakan ISIS yang mulai merambah ke negara-negara Islam, juga harus waspada terhadap gerakan-gerakan serupa yang muncul dan telah berkembang di Indonesia, sebut saja HTI. Gerakan HTI telah ada dan berkembang di Indonesia dan di Kota Parepare jauh sebelum ISIS diperbincangkan oleh dunia seperti saat sekarang ini. HTI sebagai gerakan sosial muncul dan membawa gagasan tentang negara khilafah yang menyerupai gagasan yang di bawah oleh ISIS, walaupun cara penyebaran kedua gerakan ini berbeda. Hal senada diungkapkan oleh informan penulis yang merupakan anggota kerukunan antar umat beragama Kota Parepare: Respon yang diperlihatkan oleh Amir HTI tentu sangat 'aneh' dan mengundang pertanyaan, bukankah keduanya (ISIS dan HTI) sama-sama memperjuangkan negara Islam. Tentu kemunculan ISIS yang menggunakan langgam yang sama dengan HTI merupakan ancaman tersendiri bagi HTI mengingat gerakan *taqiah* yang HTI jalankan selama ini akan terbongkar. Bila masyarakat jeli menilai maka akan ditemukan bahwa HTI sesungguhnya juga membawa ancaman yang sama bagi NKRI, mengingat kedua gerakan ini sama-sama ingin mengganti dasar negara dimanapun mereka hidup dan berkembang termasuk Indonesia. Gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh HTI akan sewaktu-waktu dapat terbongkar dan mau tidak mau perhatian pemerintah dan masyarakat akan tertuju kepada HTI. Sementara HTI sudah lama menancapkan kuku-kukunya membentuk sebuah sel yang terstruktur demi terwujudnya negara khilafah yang telah sekian tahun mereka cita-citakan.

Kemunculan ISIS akan membongkar penyamaran yang HTI lakukan selama ini dalam melakukan gerakan dalam bentuk *silence*, perjuangan HTI akan sia-siti jika pemerintah dan masyarakat mengalihkan perhatiannya kepada ISIS, iluluh sebabnya mengapa Amir HTI segera mengambil tindakan untuk fatwa tentang ketidaksetujuan HTI terhadap ISIS. Patut untuk dicurigiil HTI memberikan reaksi menolak terhadap ISIS padahal cita-cita yang diperjuangkan adalah sama.

Penulis menilai HTI rnengalami goncangan dan kekhawatiran bila penyamaran yang dilakukan oleh HTI selama ini akan terbongkar. HTI juga adalah gerakan yang mesti diwaspadai oleh pemerintah pusat dan daerah mengingat HTI juga ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah, jika polri dan mahkamah konstitusi telah menyatakan sikap dengan tegas tentang penolakan terhadap ormas atau gerakan sosial yang ingin mengganti Pancasila seharusnya lebih tegas untuk menelusuri gerakan-gerakan Islam mengancam negara kesatuan Indonesia dan berupaya untuk mengganti Pancasila. Kehadiran HTI dengan menggunakan model *taqiyah* hidup dan lebur bcrsama masyarakat adalah merupakan ancaman tersendiri yang dikemudian hari boleh

---

<sup>12</sup> Koran Fajar, *Tidak Ada Ruang untuk ISIS*, 6 Agustus 2014, h.11.

jadi akan meledak seperti "bom waktu" yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi sebuah gerakan revolusi untuk mengganti Pancasila dan mengancam NKRI, ketika pemerintah sadar sudah terlambat untuk mengantisipasinya.

Khusus di Kota Parepare, Walikota Parepare secara tegas menyatakan bahwa tidak membenarkan satu orang masyarakatnya yang tinggal di Kota Parepare yang menyalahi konstitusi, dan akan mengusir masyarakatnya jika ada yang keluar dari konstitusi. Ironisnya HTI sebagai gerakan sosial tetap *survive dan* tumbuh di Indonesia tidak terkecuali di Parepare. Tetapi karena gerakan HTI sifatnya *Silence*, menyebabkan HTI tetap aman dan leluasa menyebarkan ajarannya. Padahal gagasan yang dikembangkan oleh HTI adalah gagasan yang ingin mendirikan negara Islam dalam bentuk khilafah dan menggantikan Pancasila, padahal kedua gerakan ini sama-sama mengancam NKRI tetapi sikap dan perlakuan pemerintah terhadap keduanya tidak sama. Seyogyanya pemerintah harus mengeluarkan secara tegas larangan dan perlakuan yang sama terhadap gerakan sosial yang terindikator memiliki cita-cita yang ingin mengganti Pancasila atau mengancam NKRI.

Penulis menilai pemerintah Parepare telah lengah dalam menghadapi HTI yang Berkembang di Parepare, sebelum gerakan ini mengakar dan membentuk jaringan yang lebih luas. Walaupun gerakan HTI di Parepare tidak berdaya karena kuatnya pengaruh Islam kultural yang ada di Kota Parepare. Kehadiran organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah serta DDI di sisi lain ikut menghambat laju pertumbuhan HTI di Kota Parepare. Dari beberapa acara yang penulis hadiri, baik ketika HTI melakukan dialog lepas, seminar, ataupun memperingati hari nasional yang mereka rayakan dalam versi mereka sendiri, penulis melihat jumlah yang hadir tidak signifikan dengan lamanya HTI bermukim di Parepare. Ini menandakan baliwa HTI di Parepare "lunglai" atau tidak berdaya dengan kuatnya pengaruh organisasi besar tersebut. Ajaran dan paham yang disebarkan oleh HTI di tengah kultur masyarakat Parepare yang telah mapan dengan paham NU dan Muhammadiyah, sama sekali tidak mempunyai "greget", dan "terbongsai" ketika melakukan dialog dengan beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Parepare. Berikut petikan wawancara penulis dengan anggota kerukunan umat beragama Kota Parepare ketika penulis menanyakan mengapa pemerintah kota Parepare seolah-olah lengah terhadap kehadiran HTI di Kota Parepare:

Karena belum ada gerakan-gerakan yang perlu diperhitungkan, belum ada gerakan-gerakan yang destruktif. Jika sebuah paham belum bisa diubah maka *why not* orangnya yang harus dihilangkan, organisasi itu yang harus dihilangkan karena orangnya ada dalam organisasi itu. Mereka punya pendekatan yang orang bugis katakan "*sio-sio lemma*" artinya orang masuk dengan cara perlahan-lahan tanpa orang sadari sesudah itu orang menjadi fanatik. Dalam situasi yang seperti ini kalau kita mengharapkan *civil society* yang bergerak itu akan terjadi konflik yang lebih besar, jadi memang seharusnya yang yang bertindak tegas adalah pemerintah. Tentu dengan memperhatikan keresahan atau respon yang telah ditunjukkan oleh *civil society*.

Lebih jauh dijelaskan tentang sulitnya HTI berkembang di Parepare: Paham masyarakat di Kota Parepare sudah kuat, mereka sudah ikut menangkalkan paham-paham yang masuk mengingat sejak dulu Parepare telah menjadi kota santri dan dominan masyarakatnya berpaham *Ahlu Sunnah wal-Jamaah* ini semua yang menyebabkan bila masyarakat kota Parepare dimasukkan paham seperti itu susah berkembang, begitu juga apabila mau masuk di kampus-kampus juga akan sulit sebab kampus-kampus sudah memproteksi mahasiswanya. Untuk daerah-daerah tertentu bisa masuk tetapi kalau kita (Parepare) tidak bisa, karena masyarakat kita sudah waspada semua. Kalau dilihat secara geografis HTI juga tidak bisa berkembang karena Parepare sangat sempit. Kondisi geografis ini memungkinkan penyebaran informasi akan cepat dan komunikasi akan mudah terjalin tetapi yang lebih utama karena paham masyarakat Parepare sangat kuat.

Bagi NU, gagasan negara Islam merupakan penafsiran yang keliru terhadap pemahaman istilah Islam *kaffah* (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kewajiban pendirian pemerintah Islam. Syari'at atau hukum Islam memang harus diamalkan, tapi tidak perlu melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Kaum muslim di sebuah negara memang berkewajiban melaksanakan setiap ajaran Islam. Namun demikian kewajiban itu tidak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan Islam. Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tidak harus dengan khilafah Islamiyah.

Mengakui dan taat pada pemerintah yang sah dan berdaulat adalah wajib.<sup>13</sup> Ungkap KH. Hasyim Muzadi, dan menjelaskan bahwa dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tidak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu termasuk agama Islam.

Kelompok-kelompok Islam yang berideologi transnasional di negara asalnya sendiri kerap melahirkan konflik. Sehingga jika bangsa Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain itu mereka memang tidak sesuai dengan budaya setempat.<sup>14</sup> Tradisi keberagamaan NU merupakan amal keagamaan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, sehingga secara ringkas biasa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. NU menyadari bahwa setiap bahaya yang mengancam kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI, sebagai *indigenous* Islam atau Islam pribumi yang telah menyatu dengan denyut nadi budaya Indonesia yang damai.

Untuk mengenali kehadiran HTI dalam sebuah *event* sangatlah mudal mengingat penampilan dan ciri khas berpakaian HTI mudah terbaca. Khusus di Kota Parepare mereka tetap mempertahankan ciri berpakaian mereka sehingga dengan mudah dapat mengenali kehadiran anggota HTI, walaupun mereka

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta : The Wahid Institut, 2009), h. 195.

<sup>14</sup> Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 196

berusaha mengadaptasi pakaian yang mereka gunakan tetapi gerak dan cara berpakaian mereka sangat mudah terdeteksi. Dari penelitian penulis terhadap HTI ini dalam beberapa acara besar yang penulis hadiri memberikan kesimpulan pada penulis bahwa HTI tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan di Kota Parepare. Beberapa aktivis HTI harus pulang dengan 'tangan hampa' ketika aktivis tersebut datang dan berdialog dengan aktivis Organisasi NU dan Muhammadiyah karena gagasan mereka terbantahkan. Ini menandakan bahwa HTI di Parepare tidak berdaya.

Dari beberapa analisis kritis penulis di atas penulis menyatakan bahwa HTI di Kota Parepare adalah merupakan sebuah gerakan sosial dan bukan lagi merupakan sebuah Partai Politik seperti ketika awal terbentuknya Hizbut Tahrir atau seperti arti dari penamaan gerakan ini yaitu *Hizb* yang berarti partai, hal tersebut dikarenakan HTI di Kota Parepare memiliki salah satu kriteria sebagai gerakan sosial yang dapat *diqiyaskan* dengan kriteria *Reactionary Movement*, suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti institusi dan nilai masa kini dengan nilai dan institusi masa lampau. Contoh gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Organisasi rahasia ini berusaha mengembalikan keadaan Amerika Serikat ke masa lampau di kala institusi-institusi sosial mendukung keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit hitam (*White Supremacy*).

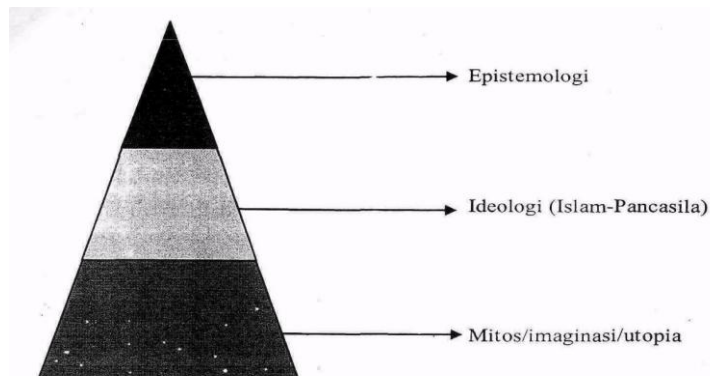
HTI di Kota Parepare juga bukan merupakan sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) karena HTI tidak memiliki kriteria yang dapat disebut sebagai OMS kriteria tersebut adalah: OMS memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan demokrasi. OMS dapat mengaktualisasikan potensi itu manakala mereka memenuhi kriteria-kriteria berikut: *Pertama*, Ditandai oleh rekrutmen anggota yang terbuka, adanya prinsip persamaan dalam organisasi. *Kedua*, OMS memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi yang memiliki otonomi, kemampuan adaptasi, koherensi dan kompleksitas. *Ketiga*, dalam dirinya QMS memiliki *civiched* yang antara lain mencakup toleransi, kepercayaan (*trust*), kerjasama, dan sebagainya. *Keempat*, OMS selalu menghargai dan mengembangkan pluralism. *Kelima*, OMS memiliki ciri '*density*' atau dukungan rakyat yang luas. OMS yang demikian biasa disebut dengan OMS yang bersemangat dan berani (*vibrant civil society organization*) yang memiliki kontribusi positif bagi pengembangan organisasi. Dan HTI tidak memiliki kelima kriteria tersebut. Demikian juga halnya HTI tidak dapat disebut sebagai sebuah partai politik karena HTI sebuah partai politik sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 2 tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan partai politik, tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik diantara tujuan pendirian partai politik yang berbunyi: a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945, b) menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 213

Jika mencermati tujuan pembentukan partai politik, maka HTI tidak dapat dikatakan sebagai sebuah Partai politik sebab cita HTI justru ingin mengganti NKRI dengan sisten khilafah dan menggunakan syariat Islam sebagai landasan pijaknya. Itulah sebabnya mengapa HTI sebaiknya mendapat perhatian ekstra dari pemerintah pusat dan daerah, HTI semestinya menjadi gerakan sosial yang terlarang untuk hidup di Indonesia sebab akan mengancam NKRI suatu saat nanti. Corak pemikiran yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, berdasarkan tinjauan teori yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman maka HTI di kota Parepare bercorak fundamentalis, ini didasarkan pernyataan-pernyataan dalam wawancara penulis dengan para aktivisnya baik secara tertulis maupun secara *life*, demikian pula dapat dilihat pada pemetaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani seperti yang penulis paparkan lebih dahulu. HTI sangat berbahaya karena sudah mengakar, sudah terbangun dalam masyarakat.

Disadari bahwa memang ada relasi fluktuatif antara agama (Islam) dengan nasionalisme (Pancasila). Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam melalui konstitusi (misalnya dalam majelis konstituante) dan lainnya melalui kekuatan senjata (seperti dalam kasus DI/TII). Namun selalu ada mayoritas bangsa Indonesia (muslim dan non-muslim) yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para pendiri bangsa. Semua ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesadaran tentang pentingnya bangunan negara bangsa. Sikap ormas-ormas, seperti NU dan Muhammadiyah misalnya, maupun parpol-parpol berhaluan kebangsaan yang menyatakan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final dan consensus nasional bangunan kebangsaan Indonesia, bukanlah sikap oportuniste politik melainkan kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis, budaya, dan tradisi bangsa serta substansi ajaran agama yang kita yakini kebenarannya. NKRI bukan berarti penyeragaman tetapi bagaimana mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan.

Berikut transmisi pemikiran dari HT Yordania ke HTI dan masuk ke Parepare:



Bagan di atas memberi gambaran kepada kita bahwa gerakan Hizbut Tahrir mengalami transformasi pemikiran dari negara asalnya di Yordania ke Indonesia sampai masuk ke Parspare, dimana ketika HT masih di negara



asalnya masih berupa mitos, imaginasi/utopia,<sup>16</sup> yang berusaha mereka wujudkan tetapi mengalami hambatan dari pemerintah setempat yang tidak menyetujui pemahaman yang di cita-citakan, setelah itu Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia dan menjadi HTI yang mengalami pergeseran pemikiran dari yang sifatnya berupa mitos menjadi pemikiran ideologi, politik merupakan kegiatan pokoknya dan Islam adalah ideologinya, memandang Islam adalah sebuah ideologi yang harus diperjuangkan dengan cara mengganti ideologi pancasila dengan ideologi Islam yang hanya dapat diwujudkan dengan sistem khilafah. Dalam tataran epistemologi, HTI kemudian masuk ke Kota Parepare yang bukan saja memperjuangkan sebuah ideologi Islam tetapi menjadi sebuah gerakan sosial berupa *Reactionary Movement*.

Pada gilirannya penulis memandang bahwa HTI berjuang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendeskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaan berbeda. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasam dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan akan dituduh melawan Islam.

Jika Islam diubah menjadi ideologi politik, maka akan menjadi sempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologi dan platform politik. Pemahaman apapun yang berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahaman mereka, dengan mudah akan dituduh bertentangan dengan Islam itu sendiri, karena watak dasar tafsir ideologi memang bersifat menguasai dan menyeragamkan. Dalam bingkai inilah aksi-aksi pengkafiran maupun pemurtadan sering dan mudah dituduhkan terhadap orang atau pihak lain. Perubahan ini jelas mereduksi, mengamputasi, dan mengibiri pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologi yang sempit dan kaku.

## V. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Organisasi Masyarakat Islam, sebagai berikut:

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang politik, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi *dar al-Islam* dan *dar al-Kufur*. Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir adalah *founding father* dari Hizbut Tahrir menyatakan bahwa organisasi Hizbut Tahrir adalah merupakan Partai Politik dimana dalam pemikiran politiknya berusaha menegakkan syariat Islam dengan mengusung model negara dalam bentuk khalifah. Demikian juga pemikiran dalam bidang ekonomi Taqiyuddin menekankan bahwa negara

---

<sup>16</sup>Utopia adalah system social politik yang sempurna yang hanya ada dalam banyangan (khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1257

dalam hal ini berperan sebagai wasit dalam perkembangan ekonomi, untuk menindak para pelaku ekonomi yang tidak *fair* dan masih menggunakan praktek riba dalam semua transaksi, juga mencegah terjadinya monopoli.

Dalam bidang aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh HTI yaitu dengan jalur dakwah. Karena menurut Hizbut Tahrir Indonesia dakwah merupakan satu-satunya cara untuk meraih keberhasilan mendirikan khilafah itu. Walaupun pada hakekatnya Hizbut Tahrir Indonesia tidak secara gamblang menyebut Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial, sebab sejak berdirinya Hizbut Tahrir ini, memang sudah memproklamirkan diri sebagai aktivitas politik, praktis segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan pemikiran politik, baik itu berbicara masalah ekonomi maupun berbicara tentang aktivitas sosial HizbutTahrir Indonesia.

Hubungan gerakan HTI dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam gerakan sosial di kota Parepare, dapat dikatakan bahwa pemikiran Taqiyuddin sudah tidak terlalu dominan lagi yang digunakan di HTI Parepare, HTI mengembangkan metode *tabanni* atau yang lazim mereka sebut pengadopsian pemikiran. Akhir-akhir ini muncul sebuah gerak yang menamakan diri mereka ISIS yang membawa ide dan paham serupa dengan HTI, hanya yang membedakan ISIS sudah menampakkan jati dirinya sementara, HTI masih menggunakan *taqiah* dalam gerakan sosialnya. Dan boleh jadi HTI lebih berbahaya daripada ISIS sebab HTI sampai sekarang masih melakukan gerakan bawah tanah dan berusaha memperkuat sel atau jaringannya yang bisa jadi di kemudian hari akan "meletus" dan sangat berbahaya karena akan mengancam keutuhan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. HTI sebagai partai politik di negara asalnya mengalami transmisi pemikiran setelah di Indonesia, dari sebuah mitos atau Utopia tentang negara Islam masuk ke Indonesia dengan nama HTI dengan membawa pemikiran ideologi yang berusaha membenturkan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, setelah masuk ke Kota Parepare dengan sebuah epistemologi berpikir berupa gerakan sosial yang tetap mencita-citakan sebuah negara khilafah.

### Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hizbut, Tahrir, *Afkar al-Siyasiyah*. Beirut; Dar al-Ummah, 1994.
- Jahroni, Jamhari dan Jajang, *Gerakan Salafi radikal di Indonesia*. Cet. I Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Koran Fajar, *Tidak Ada Ruang untuk ISIS*, 6 Agustus 2014.

- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rodhi, Muhammad Muhsin, *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-khilafah al-Islamiyyah*, Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*. Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008.
- Rubaidi, A., *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir" ([Harmokol924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddinnabhani.html](http://Harmokol924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddinnabhani.html)). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
- Wahid, Abdurrahman (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta : The Wahid Institut, 2009.